

**Tingkat Kepatuhan Pejabat Pengadaan Pada Peraturan Pengadaan Barang
Dan Jasa Terhadap Kegiatan Pengadaan Barang Publik
Di Provinsi Papua Barat**

*Level of Compliance of Procurement Officials with Goods and Services Procurement
Regulations for Public Goods Procurement Activities
In West Papua Province*

Leonardus Maturbongs, AndoyoSupriyantono, Michael Baransano

Magister Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Papua
Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat

Email: andoyo@yahoo.com

Disubmit: 22 Juni 2022, direvisi: 17 Februari 2024, diterima: 26 Februari 2024

Doi : 10.30862/cassowary.cs.v7.i2.182

ABSTRACT: *Government Procurement of Goods and Services is an activity to obtain Goods and Services by the Regional Apparatus Work Unit, Institutions, Ministries, and other institutions whose process begins with planning needs to complete activities to obtain Goods and Services. The Procurement of Goods and Services activities are also carried out in West Papua Province, one of which is the Public Goods Procurement Activity. From the Public Procurement activities, it is hoped that it can run by the Rules for Procurement of Goods and Services. This is of course a concern for all those involved in the Procurement of Goods and Services Activities and one of them is the Government in this case the Goods and Services Procurement Officer at the Regional Apparatus Organization in West Papua Province. The purpose of this writing is to determine the Level of Compliance of Procurement Officials in the Procurement regulations on Goods and Services to Public Procurement activities in West Papua Province. This research was conducted using analytical descriptive methods. The research was conducted by interviewing and collecting data using questionnaires to the Goods and Services Procurement Officers at the Regional Apparatus Organization in West Papua Province. The sample technique or sampling technique in this study used Simple Random Sampling. To determine the Level of Compliance of Procurement of Goods and Services, the data was processed using a Likert scale which is determined by the score and then the results are analyzed descriptively. The results showed that the Level of Compliance of Procurement Officials in the Procurement regulations on Goods and Services to Public Procurement activities in West Papua Province was High.*

Keywords : *Compliance Level, Goods and Services Procurement Officer, Goods and Services Procurement Rules*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu aktivitas guna mendapatkan barang dan jasa oleh satuan kerja perangkat daerah, lembaga, kementerian, serta institusi lain yang prosesnya diawali dengan perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian aktivitas guna mendapatkan barang dan jasa.

Berkaitan dengan hal itu, peraturan presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang bertujuan guna memberi pedoman prosedur terkait tata cara pengadaan barang dan jasa yang komprehensif, jelas, serta sederhana, berdasarkan tata kelola yang baik, dan dalam hal ini pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Prosedur pedoman ini diharapkan mampu mengoptimalkan efisiensi belanja negara, iklim investasi yang kondusif, serta percepatan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan hasil pembangunan nyata di Indonesia dan khususnya di Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah khususnya di Provinsi Papua Barat bisa dijalankan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan keterbukaan, transparansi, sehat, dan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak, agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi manfaat, keuangan, ataupun fisiknya bagi pelayanan masyarakat dan kelancaran tugas pemerintahan di Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat sendiri terdapat Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 48 (empat puluh delapan) dan pada masing-masing OPD tersebut memiliki anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terdapat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa, kepala daerah dalam hal ini Gubernur Papua Barat memiliki peranan menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan anggaran atau keuangan di daerah untuk kegiatan tersebut. Wewenang kepala daerah menjadi Pengguna Anggaran (PA) sudah didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Kepala OPD, dan di dalam masing-masing OPD, Kepala OPD telah menunjuk dan mempercayakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai jabatan dan kompetensi untuk menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam menjalankan Kegiatan Barang/ Jasa. Namun didalam pelaksanaannya, ASN yang ditunjuk/menjabat ada yang belum mengetahui secara benar dan baik mengenai pengadaan barang/ jasa, namun ada juga yang telah memiliki kompetensi dengan adanya Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) tetapi didalam penyelenggaraannya masih saja ada berbagai hal yang tidak sesuai prosedur serta aturan pengadaan barang dan jasa yang ada. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/ jasa yakni adil, akuntabel, bersaing, terbuka, transparan, efektif, dan efisien yang terdapat di dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 6.

Salah satu aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan adalah kegiatan pengadaan barang publik, dimana barang publik (*public goods*) merupakan barang yang jika di konsumsi oleh seseorang tidak akan menurunkan konsumsi orang lain. Sebuah barang publik adalah barang yang tidak bisa dibatasi siapapun yang menggunakannya serta bahkan sebisa mungkin orang tidak harus mengeluarkan biaya guna memperolehnya. Barang publik ialah untuk masyarakat secara keseluruhan (umum) supaya dari seluruh kalangan bisa menikmatinya. Kegiatan pengadaan barang publik bisa dilaksanakan oleh Pihak Swasta

(perusahaan ataupun perorangan) dan pemerintah. Sifat “publik” dari suatu jasa atau barang menunjuk pada permasalahan cara jasa atau barang tersebut diberikan (delivered) kepada masyarakat. Suatu penilaian pada sifat publik dari suatu jasa atau barang tidak dapat dinilai semata – mata berdasarkan apa ia bisa diperdagangkan ataupun tidak (Yilmaz, 2005). Selain itu, suatu hal disebut sebagai *public goods* pada saat negara mempunyai peranan utama dalam proses penyaluran ataupun pengadaan supaya bisa dinikmati oleh semua masyarakat (Yilmaz, 2005).

Contoh barang publik ini diantaranya adalah jalan, jembatan, gedung, dermaga, bandara, Pasar, terminal, Sarana listrik, telekomunikasi, dan sebagainya. Di dalam Kegiatan pengadaan barang/ jasa publik di Pemerintah Provinsi Papua Barat, perlu dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan dan peraturan. Didalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa publik di Provinsi Papua Barat, ada yang belum/tidak sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Terdapat kasus kerugian negara di Provinsi Papua Barat yang disebabkan oleh mark up harga tanah yang telah diatur oleh penyedia jasa dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tidak melaksanakan kegiatan pengadaan sesuai dengan aturan dan tatacara pengadaan barang dan jasa sehingga terjadi kerugian negara. (*sumber Tabura Post tanggal 23 september 2019*). Kasus kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut, sangat berdampak terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dengan adanya masalah didalam pekerjaan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, bangunan tersebut belum selesai dikerjakan dan bangunannya belum bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kantor yang tentu saja mempengaruhi aktivitas dalam lingkungan kerja karena belum ada pemanfaatannya. Selain itu lahan yang dulunya hutan tuk pemanfaatan ekosistem

lingkungan, sekarang sudah ada bangunan yang belum selesai dikerjakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan melihat contoh kasus masih adanya permasalahan didalam aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dijalankan oleh pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk masalah tingkat kepatuhan pada peraturan pengadaan barang dan jasa, maka peneliti melakukan penelitian ini guna melaksanakan penganalisisan terkait “Tingkat Kepatuhan Pejabat Pengadaan Pada Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Kegiatan Pengadaan Barang Publik Di Provinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang beralamat di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat Andai-Manokwari Provinsi Papua Barat. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan Juli 2020.

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode deskriptif analitis ialah peneliti akan menyelenggarakan penelitian pada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah dengan melihat kompetensi/kemampuan, pemahaman yang dimiliki serta faktor lainnya terhadap Tingkat Kepatuhan pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Data yang dipergunakan berupa data sekunder dan primer.

a. Data Primer

Data penelitian akan diambil dengan menggunakan instrumen kuisisioner dengan respondennya adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.

b. Data Sekunder

Data Penelitian diambil dengan cara mengumpulkan informasi serta data melalui buku, internet, literatur jurnal yang terkait dengan tata cara dan aturan Pengadaan Barang/ Jasa dan Barang Publik

serta menggunakan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi acuan peraturannya.

Pengambilan data dilaksanakan dengan menggunakan Kuesioner. Teknik pengambilan sampel dilaksanakan dengan mempergunakan *Simple Random Sampling* (Acak Sederhana). Dimana teknik ini merupakan sebuah cara pemilihan sampel dimana tiap unsur yang membentuk populasi diberikan kesempatan yang serupa untuk dipilih sebagai sampel. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Sugiyono (2014) bahwasanya dikatakan “sederhana (simple) dikarenakan pengambilan sample dari populasi dilaksanakan secara acak tanpa memerhatikan strata yang terdapat didalam populasi tersebut. Sampel menurut Sugiyono (2014) yaitu bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasinya besar, peneliti tidak mungkin memahami seluruh populasi, disebabkan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka peneliti bisa mempergunakan sampel yang dipilih dari populasi diharuskan benar – benar mewakili (*representative*). Berdasarkan jumlah populasi tersebut, peneliti akan menggunakan sampel sejumlah 30 (tiga puluh) orang Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang terdapat dalam Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.

Variabel Penelitian

a. Variabel bebas (*independent variables*)

Variabel ini ialah variabel yang memengaruhi atau penyebab terjadinya atau terbentuknya variabel terikatnya (*dependent variable*). Variable yang yang dipergunakan yakni Faktor Internal (X1) dan Faktor Eksternal(X2).

Untuk mengukur Variabel bebas digunakan indikator sebagai berikut:

1. Variabel Faktor Internal (X1)
 - Pengetahuan (X1.1)
 - Integritas (X1.2)
 - Pengalaman Masa Kerja (X1.3)
2. Variabel Faktor Eksternal (X2)
 - Sertifikasi Pejabat Pengadaan (X2.1)
 - Pelaksanaan Aturan Pengadaan Barang & Jasa (X2.2)

Sebagai variable penunjang yaitu usia, jenis kelamin dan masa kerja responden.

b. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel ini adalah variable yang dipengaruhi variabel bebasnya (*independent variables*).

Variable yang dipergunakan yakni produktivitas (Y) sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Data yang dipergunakan pada penganalisisan penelitian ialah data kuantitatif yang adalah fakta yang di presentasikan dengan angka. Data bisa diukur secara langsung dan tidak sedikit data yang bisa di ukur secara langsung. Dalam hal ini, skala pengukuran adalah serangkaian aturan yang dibutuhkan dalam mengkuantitatifkan data dari pengukuran sebuah variable. Dimana skala pengukuran yang dipergunakan yaitu skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal adalah data yang berjenjang di mana nomor – nomor yang digunakan pada objek guna memberi informasi terkait jumlah relative karakteristik berbeda yang di miliki oleh individu atau obyek tertentu. Maka dari itu, jarak satu data dengan yang lainnya kemungkinan memiliki perbedaan. Tiap poin jawaban ditetapkan skornya dengan skala Likert 1 hingga 3.

Tabel 1. Alternatif Jawaban Responden

Alternatif Jawaban	Skor
Ya (A)	3

Rentang Skala Interval

Hasil interpretasi dari tiap pernyataan yang dipergunakan dalam kuesioner dipilih sesuai dengan rentang skala menggunakan rumusan berikut (Sugiyono, 2017) :

Ragu – Ragu (B)	2
Tidak (C)	1

$$RS = \frac{n(m-1)}{m}$$

Keterangan:
 RS = Rentang Skala
 n = Sampel
 m = Kategori jawaban

$$RS = \frac{30(3-1)}{3}$$

$$RS = \frac{30(2)}{3} = 20$$

Dengan demikian, dari rumusan di atas diperoleh nilai rentang skala interval yang didapatkan guna menginterpretasikan hasil Tabel 2. Rentang skala interval

Rentang Skala	Kategori
30 – 50	Rendah
51 – 70	Sedang
71 – 90	Tinggi

Sumber : Olah Data, 2020

Setelah mendapatkan rentang skala interval kemudian menentukan Nilai untuk Faktor Internal (X1) yang bisa diamati pada table 3 berikut.

Tabel 3. Nilai untuk Faktor Internal (X1)

Rentang Skala	Kategori
180 – 300	Rendah
301 – 420	Sedang
421 – 540	Tinggi

Sumber :Olah Data, 2020

Setelah mendapatkan rentang skala interval dan nilai untuk faktor internal (x1) kemudian dicari nilai untuk faktor eksternal (X2) yang bisa diamati pada table 4 berikut.

Tabel 4. Nilai untuk Faktor Eksternal (X2)

Rentang Skala	Kategori
120 – 200	Rendah
201 – 280	Sedang
281 – 360	Tinggi

Sumber :Olah Data, 2020

Setelah ditentukan rentang skala interval dan Nilai untuk Faktor Internal (X1) serta Nilai untuk Faktor Eksternal (X2), maka ditentukan Nilai untuk Faktor KepatuhanPengadaan Barang dan Jasa (Y) yang bisa diamati pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Nilai untuk Faktor KepatuhanPengadaan Barang dan Jasa (Y)

Rentang Skala	Kategori
300 – 500	Rendah
501 – 700	Sedang
701 – 900	Tinggi

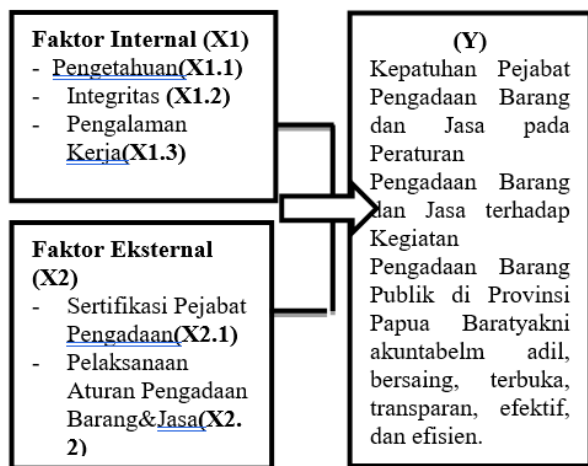
Sumber :Olah Data, 2020

jawaban kuesioner dengan hasil 20. Rentang skala interval yang didapatkan untuk menginterpretasi hasil jawaban kuesioner bisa diamati berikut:

Berikut ini adalah rentang skala interval:

Kerangka Hubungan antara variabel

Penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel Y yang merupakan kepatuhan pejabat pengadaan barang dan jasa pada peraturan pengadaan barang dan jasa terhadap kegiatan pengadaan barang publik di provinsi papua barat yakni akuntabel, adil, bersaing, terbuka, transparan, efektif, dan efisien. variabel y dipengaruhi oleh 2 variabel x yakni faktor eksternal dan internal. variabel faktor internal (x1) didalamnya terdapat indikator pendidikan, integritas dan pengalaman kerja. Variabel faktor eksternal (x2) didalamnya terdapat indikator sertifikat pejabat pengadaan dan pelaksanaan aturan pengadaan barang dan jasa. Kerangka berpikir menjadi model konseptual yang dipergunakan menjadi teori yang memiliki keterkaitan dengan banyak faktor yang diidentifikasi menjadi permasalahan penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Dalam melaksanakan suatu penelitian yang memerlukan kerangka berpikir, sebaiknya jika hal ini dapat dijelaskan secara teoritis. Sekaligus juga dapat menjelaskan hubungan diantara variable yang diangkat. Dengan demikian peneliti dapat menjelaskan hubungan diantara variabel independen dan variabel dependent (Sugiyono, 2014). Maka dari itu, penelitian ini akan dianalisis seberapa besar tingkat kepatuhan pejabat pengadaan barang dan jasa yang dipengaruhi oleh variabel x (faktor eksternal dan internal) yang adalah pejabat pengadaan terhadap variabel y yaitu kepatuhan pejabat pengadaan barang dan jasa. Gambar kerangka hubungan antara variabel dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Kerangka Hubungan antara variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berikutnya dikenal dengan sebutan pengadaan barang/jasa merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah/ lembaga/ kementerian yang dibiayai oleh anggaran dari APBD/ APBN yang prosesnya diawali dengan klasifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan dengan adanya bukti berita acara serah terima pekerjaan. Kegiatan Pengadaan barang/jasa pemerintah baik dari anggaran APBN atau APBD sudah dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia. Didalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan oleh seluruh Pihak yang mempunyai peran dalam kegiatan tersebut dan salah satunya adalah pejabat pengadaan barang dan jasa. Pejabat tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan di dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat daerah.

Analisis karakteristik responden

Responden yang dipergunakan yakni Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yang dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang berjumlah 30 orang.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Data terkait jenis kelamin dijadikan suatu pertimbangan guna memahami responden dengan jenis kelamin dalam penelitian yang paling dominan. Karakteristik responden didapatkan dari hasil pengumpulan data melalui pembagian kuesioner. Dalam hal ini gender adalah sebuah sifat yang menempel pada kaum perempuan ataupun laki - laki yang dikonstruksi secara kultural ataupun social (Fakih, 2016). Perempuan dan laki – laki berbeda dalam hal kekuatan kerja ototnya dan kemampuan fisiknya. Postur tubuh, ukuran, dan daya tahan tubuh laki– laki dan perempuan memiliki perbedaan. Sementara menurut Sugandi (2009) kemampuan untuk bergerak berkisar 35 – 80 % bergantung pada otot yang dilibatkan. Jenis kelamin adalah suatu kategori dasar dalam kehidupan sehari – hari dan kehidupan social.

Tabel 6. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responde n (Orang)	Presentase (%)
1.	Laki-laki	18	60
2.	Perempuan	12	40
Total		30	100

Sumber : Data primer, 2020

Dari hasil analisis karakteristik responden menurut jenis kelaminnya pada tabel 3 diperoleh hasil bahwasanya mayoritas responden laki – laki berjumlah 18 responden (60 %), sementara responden perempuan berjumlah 12 responden (40 %), sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kebanyakan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yang dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa adalah laki-laki.

Karakteristik responden berdasarkan usia

Data terkait usia dijadikan suatu pertimbangan untuk mengetahui responden dengan usia yang paling dominan. Mahendra

& Woyanti (2014) dan Tanto et,al (2012) menjelaskan bahwasanya faktor yang memiliki pengaruh pada produktivitas karyawan salah satunya yaitu faktor usia. Menurut Selvia Aprilyanti (2017), biasanya usia yang masih dalam usia produktif memiliki tingkatan produktivitas yang lebih tinggi daripada tenaga kerja yang memiliki usia tua dengan demikian fisik yang di miliki menjadi terbatas dan lemah.

Tabel 7. Karakteristik responden berdasarkan usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	< 30	0	0
2.	31 – 40	3	10
3.	41 – 50	18	60
4.	> 50	9	30
	Total	30	100

Sumber : Data primer, 2020

Dari hasil analisis karakteristik responden berdasarkan usia dalam table di atasmenampilkan bahwasanya mayoritas responden ada di kelompok usia 41 – 50 tahun sejumlah 18 responden (60 %) dan responden kelompok usia > 50 tahun sejumlah 9 responden (30 %). Ini mengindikasikan bahwasanya mayoritas responden Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat berada di usia 41-50 tahun.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Data terkait jenjang pendidikan bisa dipergunakan dalam memahami besaran iidentitas responden menurut pendidikannya. Hasibuan (2003) menjelaskan bahwasanya pendidikan ialah sebuah indikator yang menggambarkan kemampuan individu guna bisa melaksanakan sebuah pekerjaan. Pendidikan memberi pengetahuan bukan saja yang langsung dengan penyelesaian tugasnya, namun juga landasan guna mengembangkan kemampuan dan dirinya dalam memanfaatkan seluruh sarana yang ada demi kelancaran penyelesaian tugas. Dari hasil analisis karakteristik responden menurut pendidikannya menunjukkan

bahwasanya responden mempunyai latar pendidikan yang berbeda.

Tabel 8. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	SMA/SMK	0	0
2.	Diploma (D3)	0	0
3.	Sarjana (S1)	23	76,66
4.	Pascasarjana (S2)	7	23,34
	Total	30	100

Sumber : Data Primer, 2020

Tabel 5 menampilkan bahwasanya mayoritas responden mempunyai latar belakang Pendidikan yang didominasi dengan Pendidikan S1 sebanyak 23 responden (76,66%) dan Pendidikan S2 sebanyak 7 responden (23,34%) dari total responden penelitian. Pendidikan bisa memperlihatkanbesaran pengaruh perilaku dan sikap dalam perkembangan pribadi secara utuh serta partisipasinya pada melaksanakan suatu tanggungjawab dalam bekerja salahsatunya dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Pertimbangan yang dipergunakan dalam memahami dominasi identitas responden salah satunya yaitu berdasarkan masa kerja. Pamungkas et al (2017), Wirawan, et al (2014), dan Nainggolan et al (2012) menjelaskan bahwasanya berbagai faktor yang memengaruhi produktivitas individu dalam bekerja yaitu lamanya bekerja. Semakin lamanya masa kerja karyawan maka kemampuan dan keterampilan melaksanakan pekerjaan semakin meningkat. Pengalaman individu dalam menjalankan pekerjaannya secara terus menerus dapat menambah kedewasaan teknisnya. Dalam hal ini, masa kerja ialah tingkatan penguasaan individu dalam penyelenggaraan berbagai aspek teknik pekerjaan dan teknik peralatan. Adapun berbagai hal yang menentukan berpengalaman atau tidak karyawan serta sekaligus menjadi indicator pengalaman kerja yakni penguasaan dan keterampilan

pada pekerjaan, tingkat pengetahuan, dan usia / lama waktu kerja (Aprilyanti, 2017).

Tabel 9. Responden berdasarkan masa kerja

No.	Masa kerja (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	< 1	0	0
2.	1 - 5	0	0
3.	6 - 10	11	36,66
4.	> 10	19	63,34
	Total	30	100

Sumber : Data primer, 2020

Tabel 6 menampilkan bahwasanya hasil analisis karakteristik responden menurut masa kerja kebanyakan responden sudah bekerja diatas 10 tahun yakni berjumlah 19 orang (63,34 %) sementara responden yang sudah bekerja diantara 6 – 10 tahun yaitu berjumlah 11 orang (36,66%).

Analisis deskriptif Faktor Internal dengan Eksternal

Faktor Internal

Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor Internal yang diukur menggunakan tingkat Pengetahuan, Integritas dan Pengalaman Kerja. Penganalisisan deskriptif dilaksanakan dengan mencari nilai rata – rata yang didapatkan, yang diperoleh dengan mempergunakan rentang skala interval yang ditetapkan sesuai dengan kriterianya masing – masing, guna memahami kompetensi variabel bebas yang diamati.

Penjelasan dari hasil analisis deskriptif faktor internal adalah dengan analisis data dari jumlah jawaban responden dengan hasil total skor adalah sebesar 90 dengan kategori tinggi (sesuai rentang skala interval) yaitu pada indikator pengetahuan pejabat pengadaan tentang peraturan pengadaan barang dan jasa. Ini disebabkan karena responden pejabat pengadaan barang dan jasa mengetahui tentang peraturan pengadaan barang dan jasa dan memahami serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tatacara pengadaan barang dan jasa yang ada di dalam aturan pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan untuk penjelasan dari hasil analisis deskriptif faktor internal skor terendah adalah dengan total skor adalah sebesar 70

dengan kategori sedang (sesuai rentang skala interval) yaitu pada indikator pengalaman kerja pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ini disebabkan karena responden pejabat pengadaan barang dan jasa beranggapan bahwa dengan memiliki pengalaman kerja yang lama dibidang pengadaan barang dan jasa, belum tentu dapat membantu seseorang pejabat pengadaan dalam menguasai aturan dan pedoman. Selain itu juga responden pejabat pengadaan barang dan jasa beranggapan bahwa dengan memiliki pengalaman kerja yang lama dibidang pengadaan barang dan jasa tidak juga dapat menjamin seseorang pejabat pengadaan untuk bekerja dengan baik dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Faktor Eksternal

Setelah dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor internal maka dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor eksternal yang diukur menggunakan tingkat sertifikasi pejabat pengadaan dan pelaksanaan aturan pengadaan barang dan jasa. Penganalisisan deskriptif dilaksanakan dengan mencari nilai rata-rata yang didapatkan, yang diperoleh dengan mempergunakan rentang skala yang ditetapkan sesuai dengan kriterianya masing – masing, guna memahami kompetensi variabel bebas yang diamati.

Penjelasan dari hasil analisis deskriptif faktor Eksternal adalah dengan analisis data dari jumlah jawaban responden dengan hasil total skor adalah sebesar 86 dengan kategori tinggi (sesuai Rentang Skala Interval) yaitu pada indikator Pelaksanaan Aturan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini dikarenakan responden Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa namun pernah terbentur dengan kebijakan. Sedangkan untuk penjelasan dari hasil analisis deskriptif faktor eksternal skor terendah adalah dengan total skor adalah sebesar 65 dengan kategori sedang (sesuai rentang skala interval) yaitu pada indikator sertifikasi pengadaan

barang dan jasa yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Hal ini dikarenakan responden Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa beranggapan bahwa dengan mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa belum tentu dapat menjamin seseorang pejabat pengadaan dalam menguasai aturan dan pedoman pengadaan barang dan jasa serta dalam pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah dijalankan sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa oleh pejabat pengadaan tersebut tetapi juga terbentur dengan kebijakan yang dibuat pada proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Analisis deskriptif Kepatuhan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Setelah dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor internal dan faktor eksternal maka selanjutnya dilakukan analisis deskriptif terhadap kepatuhan pejabat pengadaan barang dan jasa yang diukur menggunakan tingkat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai dengan aturan dan adanya kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut. Analisis deskriptif kepatuhan pejabat pengadaan barang dan jasa adalah hasil nilai penjumlahan dari analisis deskriptif faktor internal dan faktor eksternal yang diambil dari nilai terendah yang telah dijumlahkan dan nilai tertinggi juga yang telah dijumlahkan. Hasil penjumlahan nilai terendah dan nilai tertinggi dari analisis deskriptif faktor eksternal dan internal. Hasil total skor pada analisis deskriptif faktor eksternal dan hasil total pada analisis deskriptif faktor eksternal setelah dijumlahkan dengan hasil yaitu sebesar 776 dengan kategori Tinggi.

Sehingga dari hasil analisis disampaikan bahwa tingkat kepatuhan pejabat pengadaan barang/jasa terhadap kegiatan pengadaan barang publik pada organisasi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Provinsi Papua Barat berada pada kategori tingkat tinggi karena pejabat pengadaan sudah

melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan aturan dan pedoman pengadaan barang dan jasa yang diberlakukan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang bisa diambil yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap kegiatan Publik di Provinsi Papua Barat berada pada Kategori Tingkat Tinggi.
2. Faktor Internal
 - a. Hasil analisis deskriptif faktor internal adalah dengan analisis data dari jumlah jawaban responden dengan hasil total skor adalah sebesar 90 dengan kategori tinggi. Sedangkan untuk penjelasan dari hasil analisis deskriptif faktor internal skor terendah adalah dengan total skor adalah sebesar 70 dengan kategori Sedang.
 - b. Faktor Eksternal
Penjelasan dari hasil analisis deskriptif faktor eksternal adalah dengan analisis data dari jumlah jawaban responden dengan hasil total skor adalah sebesar 86 dengan kategori tinggi. Sedangkan untuk penjelasan dari hasil analisis deskriptif faktor eksternal skor terendah adalah dengan total skor adalah sebesar 65 dengan kategori sedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar A. Ika., (2013). Analisis Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan LKPP. *Tesis*. Prodi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia Jakarta.
- Ismail F., (2018). *Statistika Untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Pendidikan*. Penerbit Prenadamedia Group Jakarta. Edisi pertama Tahun 2018.
- Juanda Bambang., (2009). *Ekonometrika Pendugaan dan Pemodelan*. IPB PRESS. Bogor.
- Kesumawati N., Novita S., Allen M. R., (2017). *Pengantar Statistika Penelitian*. Penerbit PT.

- RAJAGRAFINDO PERSADA
Jakarta. Edisi pertama Tahun 2017.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2018 *Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah*. 16 Maret 2018.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
33. Jakarta.
- Priyastama R., (2017). *Buku Sakti Kuasai
SPSS Pengolahan Data & Analisis
Data*. Penerbit STAR UP
Yogyakarta. Edisi pertama Tahun
2017.
- Santoso S., (2015). *Menguasai Statistik Non
Parametrik Konsep Dasar dan
Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit PT.
Elex Media Komputindo Kompas
Gramedia Jakarta. Terbitan
pertama Tahun 2015.
- Satriawan F., (2018). Penerapan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik (SPSE) Dalam
Mewujudkan Transparansi
Pemerintahan (Studi Pada LPSE dan
BLPBJProvinsi Lampung. *Tesis*.
Program Magister Ilmu
PemerintahanFakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Lampung BandarLampung.
- Sugiyono., (2014). *Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.
- Sugiyono., (2017). *Statistika Untuk
Penelitian*. Penerbit ALFABETA
Bandung. Edisi ke dua puluh
delapan Tahun 2017.
- Syayuti., (2016). Penerapan Good
Governance Pengadaan Barang dan
Jasa pada Pemerintah Kabupaten
Bungo (studi Kasus pada Dinas
Pendidikan. *Tesis*. Program Pasca
Sarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Usman H., Purnomo S. A., (2017).
*Metodologi Penelitian
Sosial*. Penerbit PT. Bumi Aksara
Jakarta. Edisi ketiga Tahun 2017.